

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPENGAWASAN GURU SEKOLAH DASAR DI UPT SIDOHARJO WONOGIRI

THE IMPLEMENTATION OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHER SUPERVISORY POLICY AT UPT SIDOHARJO WONOGIRI

Oleh: Arif Suseno, Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, FIP, Universitas Negeri Yogyakarta, susenoa3@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan kepengawasan guru sekolah dasar di UPT Sidoharjo Wonogiri, yang isinya tentang bagaimana implementasi kebijakan kepengawasan guru sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pengawas sekolah dan guru. Setting penelitian dilakukan di UPT Sidoharjo. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif atau berkaitan satu sama yang lain sehingga data yang diperoleh jenuh, yaitu dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) implementasi kepengawasan guru sekolah dasar dengan cara pengawas membina guru, menilai guru dan meningkatkan profesionalisme guru, (2) implementasi kebijakan kepengawasan guru sekolah dasar sebagai berikut: (a) komunikasi antara pengawas sekolah dengan guru di UPT Sidoharjo guru kesulitan memahami informasi yang diberikan pengawas, sehingga permasalahan belum terselesaikan, (b) sumber daya pengawas sekolah dasar di UPT Sidoharjo tidak sebanding dengan jumlah guru, sehingga pengawas datang ke sekolah sebulan sekali, (c) sikap dari pengawas sekolah dalam melaksanakan kebijakan tersebut hanya melakukan kegiatannya sesuai jadwal dan tidak ada tambahan di luar jadwal datang ke sekolah binaan (d) struktur birokrasi dalam kebijakan kepengawasan guru sekolah dasar secara garis besar sudah sesuai dengan peraturan menteri pendidikan.

Kata kunci: *Implementasi kebijakan, pengawas sekolah, dan guru sekolah dasar*

Abstract

This study aimed to describe the implementation of Elementary School Teacher Supervisory Policy at UPT Sidoharjo Wonogiri, which contained the implementation of supervisory policy elementary school teacher. The type of this research is descriptive qualitative with case study approach. The subjects of the result were school superintendents and teacher. The research was conducted at UPT Sidoharjo. Data collection techniques used was observation, interviews, and documentation. Data analysis used was interactive models consist of data collection, data reduction, and data display. Data validation using methodological and data source triangulation. The result shows that: (1) The implementation of Elementary School Teacher Supervisory was done by fostering, assessing, and increasing teachers' professionalism the superintendents, (2) The implementation of Elementary School Teacher Supervisory Policy are as follows:: (a) The teachers are having some troubles in understanding the information provided by the superintendents so that the problem has not been resolved, (b) The resource of superintendents primary school at UPT Sidoharjo is not proportional to the number of teachers, so that the superintendents come to school once in a month, (c) The superintendents only conduct their activity according to the schedule (d) The bureaucratic structure of Elementary School Teacher Supervisory is generally in accordance with the regulations of the minister of education.

Keywords: *Policy implementation, superintendent of schools, and elementary school teacher*

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai usaha sadar bagi pengembangan manusia dan masyarakat, mendasarkan pada landasan pemikiran tertentu, pandangan hidup atau filsafat hidup, bahkan latar belakang sosiokultural tiap-tiap masyarakat, serta pemikiran-pemikiran psikologis tertentu (Dwi Siswoyo dkk, 2012: 1). Hal ini akan menentukan nasib suatu bangsa di masa yang akan datang tergantung dengan kualitas lembaga pendidikannya, baik formal, nonformal, dan informal.

Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan dan membentuk karakter watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan peserta didik dalam menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu dan kreatif. Tujuan pendidikan sebagai penuntun, pembimbing dan petunjuk arah bagi para peserta didik, guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah agar bekerja sama dalam mewujudkan tujuan pendidikan tersebut.

Untuk mencapai mutu pendidikan yang baik, perlu diperhatikan semua komponen-komponen yang perlu diperbaiki atau pembaharuan perkembangannya. Salah satu komponen keberhasilan pendidikan ditentukan oleh komponen pengawasan.

Untuk itu pemerintah mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan.

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, ditegaskan bahwa fungsi pengawas sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Sebagai supervisor akademik, pengawas sekolah berkewajiban untuk membantu kemampuan profesional guru agar dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan sebagai supervisor manajerial, pengawas berkewajiban membantu kepala sekolah agar menciptakan sekolah yang efektif. Pembinaan dan pengawasan menjadi tugas pokok pengawas sekolah. Pengawas sekolah harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang lebih dari guru dan kepala sekolah. Peranan pengawas sekolah hendaknya menjadi konsultan pendidikan yang sentiasa mendampingi guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Pemendiknas Nomor 12 tahun 2007 menyebutkan bahwa ruang lingkup pengawas sekolah adalah melakukan supervisi akademik dan supervisi manajerial dengan

bebabn kerja sebanyak 37,5 per minggu. Kegiatan tatap muka ditetapkan 24 jam perminggu menggunakan pendekatan jumlah sekolah dan guru yang dibina. Jumlah sekolah yang harus dibina oleh pengawas SD minimal 10 sekolah dan/atau 15 sekolah dan jumlah guru yang harus dibina tiap pengawas SD paling sedikit 10 orang dan/atau 60 orang.

Pengawas sekolah di Wonogiri ditempatkan di kantor dinas pendidikan UPT di kecamatan masing-masing. Untuk di kecamatan Sidoharjo terdapat 3 pengawas sekolah dasar. Di UPT Sidoharjo terdapat 32 SD dan 327 guru. Kunjungan singkat menjadi hal biasa bagi pengawas karena jumlah personil tak sebanding dengan jumlah sekolah dan guru. Kunjungan ke sekolah hanya dilakukan sebulan sekali dan ada beberapa sekolah yang hanya dikunjungi waktu UAS dan penilaian guru. Faktor geografis menjadi salah satu faktor alasan pengawas jarang datang ke sekolah binaannya.

Kompas.com pada tanggal 31 Januari 2010 memberitakan bahwa pengawas sekolah kenyataannya dalam upaya peningkatan mutu sekolah masih minim dikarenakan minimnya kualitas dan kemampuan pengawas sekolah dalam mengembangkan sekolah. Padahal peran pengawas sekolah lebih penting dan lebih kuat daripada pegawai di dinas pendidikan karena pengawas sekolah seharusnya memahami apa yang diperlukan dalam menilai kinerja akademik, managerial dan kewirausahaan kepala sekolah.

Peran pengawas sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan adalah melakukan pembinaan terhadap guru. Kegiatan utama pengawas dalam melaksanakan supervisi terhadap guru adalah meningkatkan mutu pembelajaran agar prestasi peserta didik meningkat. Dengan demikian perlu dilakukan pengawasan terhadap proses pembelajaran oleh pengawas sekolah. Adanya pengawasan proses pembelajaran secara teratur, disertai masukan yang membangun berupa rekomendasi hasil pengamatan guru dalam KBM, maka kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan bermutu.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memandang suatu kompleks yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif instrumennya orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri (Sudiyono, 2009:8).

Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di UPT Sidoharjo Kabupaten Wonogiri. Waktu penelitian ini adalah pada bulan Agustus 2016 sampai bulan September 2016.

Subjek Penelitian

Subjek yang dipilih dalam penelitian ini adalah pengawas sekolah dan guru.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang mengacu konsep dari Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2015: 91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi dengan menggunakan pedoman yang telah ditentukan, yaitu melalui pedoman wawancara dan observasi.

Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan yang digunakan dalam keabsahan data ada empat yang meliputi drajad kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Lexy J. Moleong, 2012: 324).

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik dan sumber. Sugiyono (2015: 127) menjelaskan bahwa triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik

yang berbeda, sedangkan triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Kepengawasan Guru Sekolah Dasar Pada Dimensi Pembinaan Guru Di UPT Sidoharjo

Pengawas sekolah mengadakan program pembinaan guru agar kualitas guru baik. Pengawas sekolah secara rutin melaksanakan pembinaan terhadap guru agar kualitas guru meningkat. Pengawas di UPT Sidoharjo melaksanakan program pembinaan terhadap guru. Pembinaan terhadap guru dibagi disetiap gugusnya, di UPT Sidoharjo ini terdapat 3 gugus yaitu gugus sinar harapan setiap Rabu, gugus kota setiap Sabtu dan gugus selatan setiap Sabtu. Setiap gugus diampu oleh satu pengawas. Pelaksanaan pembinaan guru dibagi menjadi 2 kelas yaitu untuk guru yang mengampu kelas rendah dan guru yang mengampu kelas tinggi. Tujuannya yaitu agar guru dapat menerima materi yang diberikan oleh pengawas sekolah secara maksimal. Karena cara mengajar peserta didik di sekolah antara kelas bawah dan kelas atas berbeda.

Program pembinaan guru ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas

mengajar guru. Materi dalam pembinaan guru ini meliputi, pembinaan agar guru melaksanakan tugas pokok sebagai guru, pembuatan RPP, dan media perangkat pembelajaran yang digunakan guru disaat mengajar. Pengawas sekolah dalam hal membina guru selalu menekankan agar guru selalu mengutamakan kualitas mengajar agar peserta didik dapat menerima materi yang diajarkan oleh guru. Tapi materi yang disampaikan pengawas ke guru masih ada yang kurang bisa dipahami oleh guru.

2. Implementasi Kebijakan Kepengawasan Guru Sekolah Dasar Pada Dimensi Penilaian Guru di UPT Sidoharjo

Upaya peningkatan kualitas guru khususnya di UPT Sidoharjo pengawas sekolah melakukan tugasnya yaitu dengan menilai kinerja guru. Pengawas datang ke sekolah guna melihat langsung guru mengajar dan pengawas mengamati untuk menilai guru. Pengawas melakukan penilaian dengan cara melakukan wawancara, pengamatan, pemantauan. Penilaian kinerja guru dilakukan dengan mengacu kepada dimensi tugas utama guru yang meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai termasuk menganalisis hasil penilaian dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Tugas utama ini kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja yang dapat diukur sebagai bentuk unjuk kerja guru dalam melaksanakan tugas utamanya

tersebut akibat dari kompetensi yang dimiliki guru. Terdapat 4 kompetensi guru yaitu, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Penilaian kinerja guru yang mencakup 3 dimensi tugas utama dengan indikator kinerjanya masing-masing yang dinilai berdasarkan unjuk kerja akibat kompetensi yang dimiliki guru. Untuk masing-masing indikator kinerja dari setiap dimensi tugas utama akan dinilai dengan menggunakan rubric penilaian yang lebih rinci untuk melihat kinerja guru yang memiliki kompetensi tersebut tergambar dalam hasil kajian dokumen perencanaan termasuk dokumen pendukung dan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penilai/pengawas pada saat melakukan pengamatan dalam pembelajaran selama proses penilaian kinerja.

3. Implementasi Kebijakan Kepengawasan Guru Sekolah Dasar Pada Pembimbingan Profesionalisme Guru di UPT Sidoharjo

Tugas pengawas sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru adalah tugas pemberian nasehat pada setiap kunjungan pengawas ke sekolah binaannya. Pengawas memberikan nasehat/saran ke guru untuk menyiapkan bahan-bahan pengajaran, seperti RPP, silabus, dan peningkatan kapasitas sebagai guru. Pengawas juga melakukan observasi

dalam kelas, apabila pengawas menemukan kesalahan dalam pengajaran, pengawas akan memberikan saran untuk memperbaikinya. Pengawas selalu mengadakan pembekalan, pembinaan dan pelatihan guru dalam meningkatkan profesionalisme guru. Pengawas selalu mengadakan pembinaan secara rutin setiap minggunya. Semua guru mendapatkan pembinaan dari pengawas guna memperbaiki cara mengajarnya. Guru juga mendapatkan pelatihan mengajar dari pengawas agar guru dapat meningkatkan kualitasnya.

4. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Kepengawasan Guru Sekolah Dasar di UPT Sidoharjo

Terdapat empat faktor yang akan mempengaruhi sebuah proses implementasi kebijakan. Faktor utama adalah bagaimana jalinan komunikasi dalam proses implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya menjadi faktor berikutnya. Faktor ketiga yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan adalah komitmen atau sikap dari pelaksana kebijakan sesuai dengan tujuan atau tidak.

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 01/III/PB/2011 dan nomor 6 tahun 2011 membahas mengenai kegiatan kepengawasan Sekolah Dasar. Berdasarkan

peraturan yang menjadi acuan di atas, sekaligus hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti, maka diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Komunikasi

Pengawas sekolah di UPT Sidoharjo memiliki peran dan fungsi strategis dalam mendorong kemajuan sekolah-sekolah dasar binaannya terutama guru. Pengawas tersebut dapat memberikan inspirasi dan mendorong guru untuk terus mengembangkan profesionalisme dan meningkatkan kinerja mereka. Fungsi utama informasi kebijakan pengawas sekolah dasar di UPT Sidoharjo adalah menambah pengetahuan dan mengurangi ketidakpastian penginformasian yang disampaikan kepada guru. Kejelasan informasi akan bergantung pada kalimat yang efektif. Dalam menyampaikan suatu informasi kepada guru haruslah jelas informasi yang disampaikan, sesuai fakta, dan tidak mengada-ada. Dalam penyampaian informasi mengenai kebijakan pengawas sekolah dasar di Kecamatan Sidoharjo menggunakan kalimat yang efektif agar guru memahaminya dan informasi yang disampaikan harus yang terbaru.

Kejelasan informasi mengenai pengawas yang berada di UPT Sidoharjo tidak terlihat dikarenakan masih adanya guru yang harus bertanya ulang kepada pengawas sehingga guru

baru memahami apa yang disampaikan pengawas kepada guru. Kejelasan komunikasi antara pengawas adalah salah satu faktor pendukung penentu implementasi, sehingga bila komunikasi yang dilakukan pengawas dengan guru kurang maka implementasi akan gagal.

b. Sumber Daya

Sumber daya kebijakan adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu kebijakan dalam pelaksanaannya. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non fisik. Sumber daya yang ada dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang. Adapun unsur dari sumber daya atau komponen pendukung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Pengawas sekolah tentu tidak terlepas dari fungsi pengawas itu sendiri. Ruang lingkup pengawas, serta tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas implementasi kebijakan kepengawasan baik secara akademik maupun secara manajerial disatuan pendidikan. Dalam melaksanakan tugas dengan beban kerja selama 37.5 jam perminggu dan jumlah sekolah yang harus dibina minimal 10 sekolah atau 15 sekolah dan jumlah guru yang harus dibina paling sedikit 40 atau 60 orang sebagaimana yang disebutkan diatas, maka

kewajiban pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas adalah:

- a. Menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan melaksanakan evaluasi hasil pelaksana program pengawasan, membimbing dan melatih profesionalisme guru.
- b. Meningkatkan kualifikasi akademi dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- c. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika.
- d. Memelihara, memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Kinerja pengawas sekolah di daerah ini kurang karena jumlah pengawas tak sebanding dengan jumlah guru. Pengawas sekolah datang sebulan sekali kadang lebih dari sebulan baru datang ke sekolah binaannya. Kehadiran pengawas setiap satu bulan sekali tidak efektif karena pengawas tidak mengetahui permasalahan secara mendalam yang dihadapi setiap sekolah. Kehadiran pengawas yang kurang membuat kegiatan guru kurang dimonitoring, sehingga permasalahan yang terjadi pada

saat itu lepas dari kepengawasan pengawas.

2. Anggaran

Pengawas sekolah atau pengawas satuan pendidikan bertugas menilai dan membina sejumlah sekolah yang menjadi binaannya baik dari segi akademik maupun manajerial, untuk melaksanakan tugas tersebut terutama dari segi akademik pengawas melaksanakan musyawarah secara rutin kelapangan. Untuk memperlancar kegiatan pengawasan dalam melaksanakan tugas dilapangan perlu adanya dana antara lain tranformasi dan dana operasional lainnya. Anggaran dana untuk pengawas yang ada di UPT Sidoharjo sudah cukup memadai untuk operasioanal mereka. Karena anggaran pengawas disini memadai dan cukup pengawas dapat melaksanakan proses evaluasi dan pengawasan pendidkan. Sebab, untuk mendapatkan hasil efektif tentunya harus melakukan kunjungan kerja ke sekolah dengan baik. Apa lagi jika bertugas melakukan pendampingan terhadap program pendidikan. Dengan adanya dana anggaran yang memadai pengawas sekolah disini bekerja dengan profesional dan melaksanakan tugas dengan baik terutama tugas meningkatkan mutu guru.

3. Sarana Dan Prasarana.

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para pengawas. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung, diperlukan khususnya untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik, sangat dibutuhkan pengawas sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sarana untuk pengawas di UPT Sidoharjo sudah tercukupi seperti kendaraan operasional, komputer dan printer. Dan sarana tersebut kualitasnya sangat bagus namun untuk printer hanya ada satu untuk digunakan tiga pengawas sekolah dasar.

c. Sikap

Sikap atau komitmen dari pelaksana kebijakan dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Komitmen yang kuat dari pelaksana kebijakan dapat mensukseskan implementasi kebijakan, untuk itu tuntutan komitmen pada pelaksana kebijakan harus kuat dan penuh dedikasi terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan.

Implementasi kebijakan kepengawasan guru sekolah dasar di

UPT Sidoharjo yang dapat dilihat pada saat wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan belum mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan kepengawasan guru di UPT Sidoharjo. Pengawas hanya hadir sebulan sekali, kadang lebih dari sebulan baru hadir. Setiap hadir di sekolah binaannya pengawas hanya mengecek sekilas dikelas dan jam hadirnya tak menentu kadang hanya satu jam disekolah.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan kepengawasan guru sekolah dasar di UPT Sidoharjo dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 01/III/PB/2011 dan nomor 6 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Pengawas sekolah di UPT Sidoharjo mendapat ruangan kerja sendiri untuk menunjang kinerja pengawas sekolah dan untuk ruang konsultasi antara guru dengan pengawas sekolah.

SIMPULAN

Berdasarkan perumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, serta hasil temuan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembinaan Guru

Pembinaan guru di UPT Sidoharjo dibagi menjadi 3 gugus, setiap gugus diampu satu pengawas. Pelaksanaan pembinaan guru dilakukan menjadi 2 kelas sehingga guru dapat menerima materi yang disampaikan oleh pengawas. Pembinaan ini dilaksanakan agar guru melaksanakan tugas pokok sebagai guru.

2. Penilaian Guru

Penilaian guru bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru di UPT Sidoharjo. Guru yang berkualitas akan menciptakan peserta didik yang berkualitas. Hasil penilaian guru berguna untuk meningkatkan profesionalisme guru.

3. Peningkatan Profesionalisme Guru

Peningkatan profesionalisme guru adalah pemberian nasehat pada setiap kunjungan pengawas ke sekolah binaannya. Pengawas memberikan saran ke guru untuk menyiapkan bahan-bahan pengajaran, seperti RPP, silabus, dan peningkatan kapasitas guru. Pengawas mengadakan pembekalan, pembinaan dan pelatihan guru dalam meningkatkan profesionalisme guru.

4. Faktor Pendukung Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Kepengawasan Guru Sekolah Dasar

a. Komunikasi

Bahasa yang digunakan pengawas Sekolah di UPT Sidoharjo kurang komunikatif, sehingga guru susah memahami apa yang menjadi keinginan

pengawas sekolah dan guru harus bertanya lagi kepada pengawas sekolah agar mengerti apa maksud dari pengawas sekolah.

b. Sumber daya

Sumber daya pengawas sekolah di UPT Sidoharjo tak sebanding dengan guru yang diawasi karena jumlah pengawas di UPT Sidoharjo berjumlah 3 orang dan gurunya berjumlah 327 orang. Hal tersebut membuat pengawas hanya datang ke sekolah binaannya sebulan sekali dan ada yang lebih dari sebulan. Pengawas kurang bisa menjangkau secara intensif sekolah-sekolah yang berada jauh dari kantor UPT Sidoharjo.

c. Sikap

Kedatangan pengawas ke sekolah binaannya tidak menentu. Pengawas hanya mengecek sekilas kegiatan guru di kelas dan kadang hanya hadir di sekolah binaannya satu jam dalam setiap kunjungannya.

d. Birokrasi

Pengawas sekolah di UPT Sidoharjo mendapat ruang kerja untuk menunjang kinerja pengawas sekolah dan untuk konsultasi antara pengawas dengan guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Siswoyo, dkk. (2012). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Lexi J. Moleong. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 01/III/PB/2011, No. 6 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Dan Angka Kreditnya*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
- Sisdiknas. 2003. *UU No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kemendiknas.
- Sugiono.(2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet